

Volume 3 | No.2 | Edisi : Juli - Desember 2014 | ISSN : 2302-4585

JURNAL

Kompetitif



ISSN 2302-4585



9 772302 458001

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Kompetitif	Vol. 3	No. 2	Hal: 1- 149	Palembang, Juli 2014	ISSN: 2302 - 4585
------------	--------	-------	-------------	----------------------	-------------------

KOMPETITIF

Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang

DAFTAR ISI

Pengaruh Inflasi,Suku Bunga Bank Indonesia,Harga Minyak Dunia dan Cadangan Devisa Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Msy.Mikial,SE.MSi.Ak.CA	1-13
Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada PT Dwi Jaya Maju Perkasa Palembang Rizal Effendi,SE.MSi	14-24
Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Supervisi Terhadap Kinerja Guru di SDN 1 Talang Kelapa Amrillah Azrin,SE.MM	25-37
Pengaruh Tingkat Pencapaian Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang. Nina Fitriana,SE.MSi	38-64
Pengaruh Motivasi dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Koperasi Beringin Jaya Palembang Salman,SE.MP	65-74
Analisa Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Dan Aktiva Lancar Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Meti Zuliyana,SE.MSi	75-87
Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah (Ukm) (Studi Kasus Pada PT Bank Mandiri Persero Tbk) Rosalina Pebrica Mayasari,SE.MSi	88-97
Penerapan Biaya Standar Terhadap Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Langsung Pada PT Armada Gatra Palembang Liliana,SE.MSi	98 -107
Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan komunikasi Interpersonal Terhadap Kinerja Dosen Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang Agustina,M.SE.MSi	108 -132
Pengaruh Daya Tarik Iklan Dan Frekuensi Penayangan Iklan Terhadap Intensi Pembelian Happy Call Lejel Home Shopping. Sri Nova Rina,SE.MSi	133-149

PENGARUH TINGKAT PENCAPAIAN PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PALEMBANG

Nina Fitriana *)

ABSTRACT

Human resources is an important element in economic growth. To improve the quality of human resources then education has a very important role. This study aimed to examine the influence of the level of educational attainment on economic growth of Palembang.

The data used in the form of time series in 1992-2011 to obtain a description of the influence level of educational attainment on economic growth Palembang city with analysis OLS (Ordinary Least Square). Recursive models are used to see the effect of the level of educational attainment on economic growth Palembang City

The results showed that the level of educational attainment, changes in GDP per capita the previous year and the change in the number of teachers the previous year significantly affect the level of educational attainment. Educational attainment level estimation results, the number of schools significantly affect education spending. Furthermore, the education expenditure estimates, the inflation rate and the unemployment rate significantly affects the GDP per capita of Palembang.

Keywords: Educational achievement, Economic growth.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan bagian yang sangat penting dan menjadikan prioritas utama dari pembangunan nasional yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat maka perlu kualitas sumber daya manusia yang handal dan berkualitas, sehingga diperlukannya peran sektor pendidikan yang dapat memberikan

nilai tambah pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Suseno Triyanto Widodo (2002) pada saat awal pembangunan ekonomi suatu negara, umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan (growth). Hal ini bisa dimengerti mengingat penghalang utama bagi pembangunan negara sedang berkembang adalah terjadinya kekurangan modal. Masalah pertumbuhan berhubungan dengan laju pertumbuhan ekonomi,

*) Dosen Fakultas Ekonomi UTP

laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan pendapatan perkapita. Pertumbuhan ekonomi pada prinsipnya harus dinikmati penduduk, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat dinikmati penduduk jika pertumbuhan penduduk jauh lebih tinggi.

Bidang pendidikan adalah investasi sumber daya manusia pada modal fisik yang dianggap sebagai sumbangan terbesar bagi ekonomi negara. Dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu memberikan perkembangan kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, ketrampilan, keahlian, kemampuan dan wawasan agar mampu bekerja lebih produktif baik secara perorangan maupun kelompok.

Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan yang relatif besar mutlak dilakukan terutama untuk mengejar ketinggalan pendidikan negara Indonesia dengan negara-negara lain. Selain itu peningkatan pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kemiskinan, peningkatan kesejahteraan penduduk.

Gambaran mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun keatas. Selama periode 2008-2011 penduduk usia 15 tahun keatas yang sudah menamatkan sekolah pada jenjang Diploma III/SM sampai tingkat S2/S3 cenderung mengalami peningkatan. Sebaliknya jenjang pendidikan SD ke bawah cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat pendidikan penduduk Sumatera Selatan pada periode 2008-2011 meskipun cukup kecil. Pada Tahun 2011 penduduk 15 Tahun keatas yang berpendidikan Perguruan Tinggi sudah mencapai 5,66 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang hanya mencapai 5,33 persen dan tahun 2008 yaitu sebesar 4,95 persen.

Sebaliknya pada jenjang pendidikan SD ke bawah terjadi penurunan dibandingkan tahun 2008 maupun tahun 2009.(Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumsel 2011).

Biaya pendidikan diperuntukkan bagi terselenggaranya aktivitas pembelajaran dalam mencapai etos bangsa yang luhur yang tercantum dalam tujuan pendidikan. Tujuan ini bersifat filosofis, luas, menyeluruh dan mendasar dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Segenap kemampuan pemerintah dan masyarakat dicurahkan untuk terwujudnya pelaksanaan pendidikan. Segala daya dan upaya pemerintah dipusatkan untuk menyediakan kesempatan belajar bagi seluruh warganya.

Keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan tampak jelas dalam undang-undang dasar yang memprioritaskan biaya pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran belanja negara, jauh melampaui biaya penyelenggaraan pertahanan maupun kesehatan atau departemen lainnya.

Secara eksplisit tujuan pendidikan berupa” usaha mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, jujur,sehat, berilmu pengetahuan, cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Undang-undang Sisdiknas 2003).

Dengan melihat permasalahan diatas penulis tertarik, untuk mengambil judul penelitian ” Pengaruh tingkat pencapaian pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palembang”.

Dari latar belakang di atas, dapat dibuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita, jumlah sekolah ,tenaga pengajar terhadap tingkat pencapaian pendidikan Kota Palembang ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pencapaian pendidikan ,jumlah tenaga pengajar, PDRB perkapita terhadap pengeluaran pendidikan Kota Palembang?

3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pendidikan, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan PDRB perkapita Kota Palembang?

Tujuan penelitian terhadap sektor pendidikan Kota Palembang ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh PDRB perkapita, jumlah sekolah, jumlah tenaga pengajar terhadap tingkat pencapaian pendidikan Kota Palembang ?
2. Mengetahui pengaruh tingkat pencapaian pendidikan, jumlah tenaga pengajar, dan PDRB perkapita terhadap pengeluaran pendidikan Kota Palembang?
3. Mengetahui pengaruh pengeluaran pendidikan, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan PDB perkapita Kota Palembang?

Manfaat penelitian terhadap sektor pendidikan Kota Palembang ini adalah untuk :

1. Secara teoritis, studi pembangunan sektor

pendidikan sangat dibutuhkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya penelitian tentang pendidikan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah terutama Bappeda dan Dinas pendidikan Kota Palembang untuk lebih meningkatkan perannya dalam mengelola keuangan agar dapat memajukan pendidikan.
3. Bagi para peneliti, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi para peneliti selanjutnya, karena penelitian bidang pendidikan sangat dibutuhkan.

Adapun hipotesis yang diajukan adalah :

1. PDRB perkapita, jumlah sekolah, jumlah tenaga pengajar diduga berpengaruh positif terhadap tingkat pencapaian pendidikan Kota Palembang?
2. Tingkat pencapaian pendidikan, jumlah tenaga pengajar, PDRB perkapita diduga berpengaruh positif

terhadap pengeluaran pendidikan Kota Palembang?

3. Pengeluaran pendidikan, tingkat inflasi diduga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB dan tingkat pengangguran diduga berpengaruh negatif.

Pada umumnya peran negara dalam bidang pendidikan di banyak negara demokrasi bersifat akomodatif terhadap kepentingan warga negaranya di bidang pendidikan . Peran negara dalam bidang pendidikan adalah memberikan layanan kepada warga negara untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas diri warga negara tersebut menjadi lebih baik.

Dewasa ini banyak satuan pendidikan khususnya sekolah yang mengalami keterbatasan biaya yang diakibatkan oleh meningkatnya kebutuhan dalam rangka mengejar peningkatan mutu. Dari tahun ke tahun kebutuhan pendidikan di sekolah untuk proses belajar dalam rangka mengejar mutu memang membutuhkan banyak biaya, baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung baik untuk penyediaan

sarana infrastruktur pendidikan maupun untuk aktivitas akademik.

Mutu pendidikan menyangkut dua dimensi, yaitu dimensi proses dan hasil. Mutu proses diukur dari indikator mutu komponen dan interaksi antar komponen, sedangkan mutu hasil diukur dari indikator capaian skor prestasi lulusan baik menyangkut akademik maupun non akademik.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 tersebut pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa” *Rencana strategis Kementerian Pendidikan nasional Tahun 2010-2014 menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan pendidikan di pusat dan sebagai acuan bagi setiap penyelenggara dan pengembangan pendidikan di daerah.* Dengan demikian upaya pembangunan dan pengembangan pendidikan baik di pusat maupun di daerah perlu berpedoman dan mengacu kepada peraturan ini.

Menurut Fasli Jalal dan Dedi Suproyadi (2001) kecenderungan dalam satu dasawarsa terakhir menunjukkan bahwa proporsi Anggaran Departemen Pendidikan nasional RI (pemerintah pusat) adalah sekitar 5-8% dari total anggaran. Lebih-lebih sejak krisis ekonomi melanda Indonesia, kecilnya anggaran menjadi kendala bagi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, Sehingga pendidikan tampak bukan merupakan kelompok prioritas dalam pembangunan.

Investasi Pendidikan adalah investasi manusia, investasi yang dapat menjadikan manusia lebih berdaya, lebih banyak mempunyai kemampuan untuk berkarya, lebih mampu dalam memecahkan segala kesulitan hidup, dan jalan untuk memperoleh penghidupan yang lebih layak. Pendidikan memberi keuntungan ganda yaitu meningkatkan nilai harga diri dan kemampuan produktivitas yang lebih besar.

Investasi sumber daya manusia menjadikan seseorang mempunyai kebebasan memilih keahlian jenis pekerjaan yang akan

dijalaninya. Seseorang menjadi profesional bila telah memperoleh pendidikan dan pelatihan yang memadai. Keahlian profesional inilah yang menjadikan andalan seseorang untuk memilih karier pekerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat.

Kebutuhan dalam memahami ekonomi pendidikan dikarenakan bahwa proses pengembangan sumber daya manusia memerlukan alokasi biaya yang sangat besar yang harus dikelola secara rasional atas pemakaiannya. Kemudian dipertanggungjawabkan Menurut Elchanan Cohan (Nanang Fatthah, 2000:18) Ekonomi pendidikan didefinisikan : Suatu studi tentang bagaimana manusia baik secara perorangan maupun secara kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat sikap dan nilai-nilai, khususnya melalui pendidikan formal serta bagaimana mendiskusikannya secara merata

(equal) dan adil (equality) diantara berbagai kelompok masyarakat.

Biaya total pendidikan dari segi anggaran telah meningkat dari masa ke masa, kenaikan biaya pendidikan setiap waktu jauh lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan menyekolahkan anggota masyarakat. Peningkatannya jauh lebih cepat bahkan sering menjadi pusat perhatian manakala musim tahun ajaran baru dimulai, sebab biaya pendidikan telah lebih dahulu naik melebihi kemampuan para orang tua yang menyekolahkan anaknya.

Sumber-sumber biaya pendidikan antara lain dari (1) pemerintah seperti APBN dan APBD, (2) sekolah (iuran siswa), (3) Masyarakat (sumbangan), (4) dunia bisnis (perusahaan) dan (5) Hibah.

Ketersediaan dana pendidikan sejak dahulu sampai sekarang masih menjadi masalah, baik biaya rutin maupun dalam usaha meningkatkan kualitasnya. Di negara berkembang termasuk Indonesia sumber dana untuk membiayai pendidikan berasal dari APBN dan APBD, besarnya tergantung pada kemampuan negara dan komitmennya terhadap

pendidikan. Tuntutan masyarakat sekarang bukan hanya sekedar terpenuhinya keajiban belajar, melainkan dituntut pendidikan yang murah dan berkualitas, oleh karena itulah pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk menyediakan dana pendidikan yang besar sebab pendidikan merupakan usaha raksasa dalam mencerdaskan bangsa.

Salah satu penyebab anak tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena *drop-out* yang disebabkan karena alasan ekonomi,” *family and money problems*” (Gary Natiello, et al, 1989 : 208). Sekalipun tes menunjukkan bahwa anak tersebut lolos seleksi dengan tingkat kemampuan yang sama, namun ternyata dia tidak dapat menyelesaikan program belajar yang diinginkannya, karena iya tidak memiliki biaya yang cukup untuk studinya.

Perluasan pendidikan senantiasa mendukung dan dalam beberapa kasus tertentu bahkan menentukan tingkat pertumbuhan GNP tidak pernah dipermasalahkan. Hampir semua negara –negara Dunia

Ketiga sangat kekurangan tenaga ahli maupun semi ahli. Tanpa adanya tenaga-tenaga tersebut yang secara keliru dianggap hanya akan dapat disediakan melalui sistem pendidikan formal, maka negara-negara Dunia Ketiga tidak akan memiliki kader pimpinan dan generasi penerus yang andal untuk melaksanakan dan mengembangkan berbagai kegiatan pembangunan, baik dalam sektor publik maupun sektor swasta sehingga nasib bangsa secara keseluruhan akan terancam.

Beberapa poin dalam suatu karakteristik pendidikan, dimana sekolah akan memberikan kekuatan pada suatu proses kehidupan sosial. Pendidikan akan memberikan perluasan kesempatan dari suatu doktrin politik negara, dimana setiap negara akan membuat doktrin politik sehingga dengan pendidikan masyarakat akan memberikan kestabilan politik negara akibat adanya doktrin yang mengarah pada pendidikan. Pada suatu pemerintahan dengan membawa pendidikan yang didasarkan pada latar belakang negara dan perspektif yang menjadikan suatu dasar pilihan politik. Jika pendidikan

memberikan suatu perluasan pada barang publik, maka pemerintah harus memberikan subsidi pada sektor pendidikan untuk memenuhi permintaan barang publik.

Terlepas dari pemberian subsidi dimana pendidikan dasar dan lanjutan diantara pilihan bebas dan wajib maka akan menimbulkan tidak rasional dikarenakan sektor pendidikan merupakan suatu barang yang harus dipenuhi berhubungan dengan kebutuhan kehidupan selanjutnya, maka apabila ingin meningkatkan kesejahteraan perlunya pendidikan yang tinggi. Jadi pemerintah tidak hanya memperluas sektor pendidikan melainkan juga harus menggerakkan pendidikan sebagai barang publik dengan maksud pemberian fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau oleh masyarakat luas.

Ini merupakan alasan sektor pendidikan tidak boleh diserahkan pada pangsa pasar, apabila diserahkan pada pangsa pasar maka kualitas sumber daya manusia tidak merata pada sektor perekonomian. Dalam hal pilihan publik sektor pendidikan tidak terlepas dari anggaran pemerintah

yang memadai pada sektor pendidikan, karena sektor pendidikan tetap harus dijalankan oleh pemerintah untuk pemerataan pendidikan dari perbedaan pendapatan masyarakat.

Dengan memberikan subsidi pendidikan dari pemerintah, maka setidaknya biaya sekolah akan lebih terjangkau dan sisa pendapatan dapat mengkonsumsi barang lain, berbeda dengan peran swasta yang dilihat dari biaya sekolah, dimana biaya sekolah pada pihak swasta akan lebih mahal dengan sekolah negeri sehingga dapat memberikan kualitas sumber daya manusia untuk lebih meningkatkan pengetahuannya yang nantinya akan mendapatkan sekolah dengan biaya yang terjangkau dengan berbagai asumsi. Selain itu dapat dilihat berdasarkan pada perbedaan pendapatan dimana bagi sekolah negeri diberi subsidi oleh pemerintah yang berbeda dengan sekolah swasta.

Menurut Todaro (2000:) perluasan pendidikan senantiasa mendukung dan dalam beberapa kasus tertentu bahkan menentukan tingkat pertumbuhan GNP . Hampir semua negara-negara Dunia Ketiga

sangat kekurangan tenaga ahli maupun semi ahli. Tanpa adanya tenaga ahli tersebut yang akan dapat disediakan melalui sistem pendidikan formal, maka negara- negara dunia ketiga tidak akan memiliki kader pimpinan dan generasi penerus yang andal untuk melaksanakan dan mengembangkan berbagai kegiatan pembangunan, baik dalam sektor publik maupun sektor swasta.

Menurut Jose DeGergorio dan Jong Wha Lee (1999) lebih menekankan pendidikan sebagai salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi derajat tingkat ketidakmerataan pendapatan. Para pembuat kebijakan pada umumnya menyetujui pengeluaran yang tinggi pada bidang pendidikan selama itu efektif sebagai alat untuk mengurangi ketidakmerataan pendapatan.

Penelitian lain yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dilakukan oleh Fery andrianus (2003) mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan sumber daya manusia merupakan dua mata rantai . Namun demikian pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa

berjalan dengan baik walaupun peningkatan sumber daya manusia dilakukan, jika tidak ada program yang jelas dari pemerintah.

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan yang relatif besar mutlak dilakukan terutama untuk mengejar ketinggalan pendidikan negara Indonesia dengan negara-negara lain. Selain itu peningkatan pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kemiskinan, peningkatan kesejahteraan penduduk.

Model pada penelitian Gupta (1999) adalah model persamaan simultan yang terdiri dari tiga buah persamaan, yaitu :

$$L_r = a_1 + a_2 Y_t + a_3 Y_e + a_4 E_r + U_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_e = a_5 + a_6 L_r + a_7 Y_h + U_2 \dots \dots \dots (2)$$

$$Y_t = a_8 + a_9 L_r + a_{10} L_{ab} + a_{11} I_{nv} + U_3 \dots \dots \dots (3)$$

Dimana :

L_t = Literacy Rate (tingkat melek huruf)

Y_t = Besarnya PDB menurut harga berlaku

E_r = Jumlah siswa sekolah menengah yang berumur 16-18 tahun

Y_e = Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan

Y_h = pengeluaran pemerintah untuk kesehatan

L_{ab} = Jumlah total tenaga kerja dari seluruh sektor

I_{nv} = Stok kapital

Berdasarkan hasil estimasi disimpulkan bahwa tingkat melek huruf dipengaruhi oleh pendapatan nasional dan kelulusan sekolah menengah umum. Kenyataan ini sesuai dengan hasil yang diharapkan bahwa peningkatan pendapatan nasional dan pengeluaran pendidikan yang dilakukan pemerintah memberikan dampak positif terhadap sumber daya manusia yang diwakili tingkat melek huruf.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data skunder, jurnal dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data diperoleh dari beberapa sumber antara lain : BPS, Pemda, Bappeda, Diknaspora

Sesuai dengan kerangka pemikiran, data dalam bentuk time series (runtun waktu). Adapun prosedur pengumpulan data time series yang diambil dari beberapa instansi pemerintah periode 1992-2011. Dari model yang sudah dibentuk terdapat variabel yang akan dioperasionalkan dengan dukungan

indikator yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel .1

Varibel-variabel tingkat pencapaian pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palembang periode 1992-2011

Variabel	Dimensi	Indikator	Pengukuran
Pencapaian Pendidikan	Tamatan yang bersekolah pada tingkat SMU Negeri	Data tamatan SMU Negeri	Dalam angka
Pengeluaran Pemerintah sektor pendidikan	Anggaran pendidikan dari pengeluaran pemerintah	APBD pada sektor pendidikan	Dalam angka
Jumlah pengajar	Jumlah pengajar SMU negeri setiap tahun	Jumlah guru SMU negeri	Dalam angka
Jumlah Sekolah SMU	Sarana atau dalam pelayanan pendidikan dan peningkatan SDM	Jumlah gedung SMU negeri	Dalam angka
Inflasi	Suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti semakin merosotnya nilai riil mata uang suatu negara	Indek Harga konsumen	Dalam angka
PDRB Perkapita	Pertumbuhan Ekonomi	PDRB Perkapita	Dalam angka
Pengangguran	Jumlah penduduk yang belum bekerja	Data pengangguran	Dalam angka

Data yang dikumpulkan agar benar-benar valid dan andal maka dibutuhkan suatu alat ukur yang apabila digunakan akan menggambarkan keadaan sesungguhnya. Pengujian validasi asumsi-asumsi klasik yang dimiliki OLS (Ordinary Least Square). Ada 3 (tiga) asumsi klasik yang harus diuji berkaitan dengan proses estimasi metode kuadrat terkecil (OLS), untuk mengetahui apakah hasil estimasi merupakan estimasi yang bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator atau tidak . Ketiga asumsi

klasik itu adalah : Multikolenieritas, Heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif. Analisis kuantitatif ini dirancang dengan tiga persamaan yang dimana masing-masing persamaan tersebut saling berhubungan. Untuk persamaan pertama yaitu mengukur tingkat pencapaian pendidikan yang dipengaruhi oleh PDRB perkapita tahun sebelumnya, jumlah sekolah tahun sebelumnya, dan jumlah tenaga pengajar.

Persamaan kedua yaitu mengukur pengeluaran pendidikan

yang dipengaruhi oleh tingkat pencapaian pendidikan, jumlah tenaga pengajar dan PDRB perkapita tahun sebelumnya. Kemudian persamaan terakhir dilakukan dengan mengukur pertumbuhan PDRB perkapita yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi, hasil estimasi pengeluaran pendidikan dan tingkat pengangguran

Alasan adanya variabel independen dengan menggunakan perubahan tahun sebelumnya pada variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pencapaian pendidikan dan pengeluaran pendidikan, dikarenakan peningkatan kualitas SDM (Education Attainment) tidak dapat berdampak secara langsung karena dilihat dari sisi permintaan dan penawaran pada keterbatasan anggaran pemerintah pada sektor pendidikan yang dilihat pada tahun sebelumnya.

Pada penelitian ini untuk meneliti tingkat pencapaian pendidikan hanya sampai mencapai SMU Negeri, dikarenakan di Indonesia umumnya dan Kota Palembang sebagai Objek penelitian untuk menjadikan sebagai pekerja dengan batas minimum yaitu tamatan SMU untuk pekerjaan formal dan

untuk tamatan SMU Negeri disebabkan pemerintah dalam memberikan subsidi pendidikan lebih mengutamakan pada SMU Negeri.

Kemudian pada analisis kuantitatif ini melihat pengaruh sektor pendidikan yang dipengaruhi oleh variabel-variabel pendidikan dan variabel-variabel diluar pendidikan.

Sebelumnya telah digambarkan pada rancangan data tersebut, dimana untuk menganalisa tingkat pencapaian pendidikan dan pengeluaran pendidikan dengan mengacu pada penelitian Ferry Andrianus (2003) dan Lekha S.C (2000) yang telah dimodifikasi dengan melihat pada pembangunan sumber daya manusia dan indikator pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang dengan menggunakan model Recursive terdiri dari :

$$T_p = f(PDRB_{t-1}, Q_{set-1}, QL_{t-1})$$

Dimana tingkat pencapaian pendidikan (T_p) fungsi dari :

$PDRB_{t-1}$ = PDRB tahun sebelumnya

Q_{set-1} = Jumlah sekolah tahun sebelumnya

QL_{t-1} = Jumlah tenaga pengajar tahun sebelumnya

$$G_e = f(T_p, QL_t, PDRB_{t-1})$$

Dimana pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (Ge) fungsi dari :
 Tp = Tingkat pencapaian pendidikan (tamatan SMU)
 QLt = Jumlah tenaga pengajar
 PDRBt-1 = PDRB perkapita tahun sebelumnya

$PDRB = f(Ge, Ti, Pe)$
 Dimana pertumbuhan PDRB perkapita fungsi dari :
 Ge = Pengeluaran pendidikan
 Ti = Tingkat Inflasi
 Pe = Pengangguran

Pada persamaan diatas dibuat dalam bentuk natural logaritma yang diestimasi dengan menggunakan model Recurcive yang diawali dengan mengestimasi persamaan pertama sebagai berikut:

$$\ln Tp = a_0 + a_1 \ln PDRB_{t-1} + a_2 \ln Q_{set-1} + a_3 \ln Q_{Lt-1} + U_1 \dots \dots \dots (1)$$

Pada persamaan pertama untuk melihat kualitas SDM berdasarkan tingkat pencapaian pendidikan yang dipengaruhi oleh indikator pendidikan dan perubahan PDRB perkapita untuk melihat sejauh mana peran sektor pendidikan dalam meningkatkan pendidikan di Kota Palembang. Selanjutnya permintaan pendidikan dibatasi oleh anggaran pemerintah yang dapat diestimasi pada persamaan kedua setelah mendapatkan persamaan pertama.

Setelah didapatkan LnTP digunakan untuk mengestimasi persamaan kedua sebagai berikut:

$$\ln Ge = b_0 + b_1 \ln Tp + b_2 \ln Q_{Lt} + b_3 \ln PDRB_{t-1} + U_2 \dots \dots \dots (2)$$

Persamaan kedua merupakan persamaan yang melihat sejauh mana peran pemerintah dalam mengeluarkan anggaran untuk pendidikan. Jadi persamaan ini untuk melihat peran sektor pemerintah (pada pengeluaran pendidikan) yang dipengaruhi oleh indikator pendidikan dan diluar indikator pendidikan.(variabel perubahan PDRB perkapita)

Selanjutnya pada persamaan kedua didapat LnGe yang digunakan untuk mengestimasi persamaan ketiga:

$$\ln PDRB = c_0 + c_1 \ln Ge + c_2 \ln Ti + c_3 \ln Pe + U_3 \dots \dots \dots (3)$$

Pada persamaan terakhir merupakan persamaan yang menjelaskan sejauh mana dampak sektor pendidikan mempengaruhi pertumbuhan PDRB perkapita yang sebelumnya telah didapat dari estimasi pada persamaan (1) dan (2). Dimana pada persamaan ini

pertumbuhan PDRB perkapita dipengaruhi oleh tingkat inflasi, jumlah pengangguran dan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan.

Pengolahan data Analisa Regresi Berganda dengan program Software SPSS 17

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Palembang merupakan suatu daerah Tingkat II yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai UU No.5 Tahun 1947.

Jumlah penduduk Kota Palembang pada pertengahan tahun 2011 adalah sebesar 1.481.814 Jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 741.356 jiwa dan perempuan sebesar 740.458 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2010 berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000 adalah 1.455284 jiwa dengan

pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2001 adalah sekitar 1,76 %.

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada kondisi Juni 2011 di Kota Palembang terdapat 1.074.063 penduduk usia kerja atau sekitar 72,48 persen dari total penduduk Kota Palembang.

Berdasarkan tingkat pendidikan pencari kerja di Kota Palembang ini tampaknya pencari kerja dengan basis pendidikan tingkat SMU merupakan pencari kerja yang paling besar yaitu sebesar 69,44 persen dari total pencari kerja, kemudian yang berpendidikan sarjana keatas sebesar 17,01 persen sedangkan yang berbasis pendidikan sarjana muda berada di urutan ketiga yaitu sebesar 12,61 persen.

Terjadinya krisis global di tahun 2008 cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palembang. Pada beberapa sektor ekonomi laju pertumbuhan melambat dari tahun sebelumnya, yang pada akhirnya mengakibatkan total

pertumbuhan ekonomi Kota Palembang lebih kecil.

Pendapatan perkapita penduduk kota Palembang dengan migas berdasarkan harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp 32.670.008 atau bertambah sebesar Rp 3.149.387 dari tahun 2010, sedangkan berdasarkan harga berlaku tanpa migas pendapatan perkapita penduduk kota Palembang pada tahun 2011 sebesar Rp 25.273.653 atau meningkat sebesar Rp.4.478.873 dari tahun sebelumnya.

Tahun 2011 inflasi sektoral kota Palembang sebesar 1,82 persen dengan migas dan 10,75 persen tanpa migas namun kegiatan perekonomian masih mampu menaikkan pendapatan masyarakat sebesar 10,67 persen dengan migas dan 21,54 persen tanpa migas pertahun. Salah satu keberhasilan Pemerintah kota Palembang dalam mengatasi laju inflasi ditengah krisis yang melanda perekonomian dunia, dimana dalam kurun waktu 2004-2011 setiap kenaikan inflasi sektoral diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita yang cukup besar baik dengan migas maupun tanpa migas.

Artinya dengan kenaikan laju inflasi tersebut masyarakat masih mampu mengatasi adanya kenaikan harga yang pada beberapa tahun terakhir ini kurang stabil dikarenakan adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan beberapa bahan makanan pokok.

Dalam bidang pendidikan sasaran pembangunan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan antara lain ditandai oleh menurunnya jumlah penduduk buta huruf, meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan lanjutan dan berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien diharapkan akan terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan terbentuknya karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan : 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja . Oleh karena itu substansi pendidikan diantaranya adalah peningkatan akses pendidikan dasar, menengah dan akses pendidikan tinggi serta peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus ditunjang dengan pemerataan pendidikan pada segala lapisan masyarakat yang disertai dengan pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan atau dimana pemerintah setidaknya mempunyai target berdasarkan program pembangunan yang dapat sesuai dengan sasaran kesejahteraan masyarakat, jadi perlu adanya kesinambungan antara program wajib belajar dengan lapangan pekerjaan.

Pemerintah dalam melakukan investasi pendidikan salah satunya dapat dilihat dari jumlah sekolah dan tenaga pengajar. Dikarenakan pendidikan tidak langsung berdampak kepada pertumbuhan PDRB perkapita

maka pemerintah dapat melakukan investasi pendidikan yang terus dibenahi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik. Dimana setiap tahunnya dapat dikatakan pemerintah di Indonesia selalu melakukan investasi pada gedung sekolah dan tenaga pengajar.

Pada penelitian ini tingkat pencapaian pendidikan diukur dengan jumlah tamatan SMU Negeri, jika kita lihat jumlah sekolah mengalami peningkatan dari tahun 1992 sebanyak 22 Gedung sekolah SMU Negeri, pada tahun 2011 bertambah sebanyak 8 gedung sekolah menjadi 30 buah Gedung.

Pertumbuhan tenaga pengajar mengalami fluktuasi atau mengalami naik turun. Hal yang terjadi pada penurunan jumlah tenaga pengajar akibat pemerintah sudah tidak dapat menyediakan lebih banyak tenaga honorer atau akibat penurunan tamatan SMU negeri sehingga jumlah pengajar beralih kepada SLTP negeri dalam hal mengajar.

Melihat trend dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa proporsi anggaran Departemen

Pendidikan (pemerintah pusat) sebesar 5 sampai 8 persen dari total APBN. Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi menjadi kendala bagi alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pendidikan bukan merupakan prioritas tinggi dalam periode pemulihan ekonomi, bahkan bukan pula prioritas yang tinggi pada periode-periode sebelumnya. Oleh karena itu tidak ada pula jaminan bahwa di masa yang akan datang pada pendidikan untuk mendapatkan prioritas dalam anggaran pemerintah dan mengakibatkan jumlah anggaran menjadi tidak sebanding untuk pengeluaran gaji guru SD,SMP dan SMU Negeri.

Pengujian Validitas Asumsi Klasik

Syarat uji regresi dan korelasi adalah data harus memenuhi prinsip BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil yang umum, atau Ordinary Least square merupakan suatu model regresi yang dapat memberikan nilai estimasi atau perkiraan linier tidak bias paling baik . maka untuk memperoleh BLUE ada kondisi atau syarat-syarat minimum yang harus

ada pada data, syarat-syarat tersebut dikenal dengan suatu uji yang disebut uji asumsi klasik, yaitu meliputi: Multikolinearitas,

Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi

Berdasarkan hasil perhitungan dapat di bentuk persamaan regresi untuk pengaruh PDRB Perkapita, Jumlah sekolah dan Tenaga Pengajar Terhadap Tingkat Pencapaian pendidikan Kota Palembang sebagai berikut :

$$\ln T_p = 6,405 + 0,061 \ln PDRB_{t-1} + 1,436 \ln Q_{Set-1} - 0,443 \ln QL_{-1} + U_t \dots \dots \dots (1)$$

- dimana :
- T_p = Tingkat Pencapaian Pendidikan
 - b_0 = Konstanta
 - b_1 = Angka arah atau koefisien regresi
 - PDRB = PDRB perkapita
 - QSe = Jumlah Sekolah
 - QL = Jumlah Tenaga Pengajar
 - U_t = Variabel lainya yang mempengaruhi Y_1

Pada hasil pembahasan ini merupakan analisis ekonomi dari hasil regresi. Pertama-tama untuk membahas mengenai analisis dampak sektor pendidikan terhadap pertumbuhan PDRB perkapita yaitu membahas pada persamaan pertama untuk melihat tingkat pencapaian pendidikan yang dipengaruhi oleh perubahan PDRB perkapita tahun

sebelumnya, perubahan jumlah sekolah pada tahun sebelumnya dan perubahan jumlah tenaga pengajar pada tahun sebelumnya dengan periode tahun 1992-2011. Estimasi pada persamaan tingkat pencapaian pendidikan yang diwakili dengan tamatan SMU Negeri diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perubahan pertumbuhan PDRB perkapita yang diwakili oleh perubahan PDRB perkapita pada 1 tahun sebelumnya mempunyai pengaruh yang positif terhadap pencapaian pendidikan diproksikan tingkat pendidikan tertinggi SMU Negeri. Persamaan 1. tersebut diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut : Koefisien PDRB tahun sebelumnya sebesar 0,061 artinya setiap peningkatan PDRB tahun sebelumnya sebesar 1 persen, maka akan berpengaruh pada meningkatnya Tingkat pencapaian pendidikan (jumlah tamatan SMU) Kota Palembang sebesar 0,061 persen, apabila faktor-faktor lain tidak berubah (*ceteris paribus*). Atau dengan kata lain perubahan PDRB perkapita tahun sebelumnya baru dapat berdampak pada peningkatan

tingkat pencapaian pendidikan sebesar 0,061 persen. Angka pada koefisien tersebut menghasilkan elastisitas yang inelastis karena koefisien pada PDRB perkapita tahun sebelumnya lebih kecil dari 1, berarti perubahan PDRB perkapita tahun sebelumnya akan berakibat perubahan yang kecil pada tingkat pencapaian pendidikan dengan arah positif. Dengan melihat teori tentang pendidikan dan pertumbuhan PDRB perkapita, dimana untuk negara berkembang dalam meningkatkan pertumbuhan PDB perkapita bukan dengan cara memacu pengembangan modal fisik melainkan pengembangan sumber daya manusi melalui pendidikan formal untuk menghasilkan masyarakat berkualitas yang dapat mengembangkan pembangunan suatu negara dan secara khusus menciptakan angkatan kerja. Jadi peningkatan pertumbuhan PDRB perkapita tahun sebelumnya dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk variabel jumlah sekolah tahun sebelumnya mempengaruhi tingkat pencapaian pendidikan diproksikan tingkat

pendidikan tertinggi SMU negeri dari hasil estimasi menunjukkan arah yang positif. Nilai koefisien pertumbuhan jumlah sekolah sebesar 1,436 artinya setiap peningkatan Jumlah sekolah sebesar 1 persen, maka akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat pencapaian pendidikan (jumlah tamatan SMU) Kota Palembang sebesar 1,436 persen. Terjadinya nilai koefisien yang menunjukkan angka lebih dari 1 berarti pertumbuhan jumlah sekolah menyebabkan pengaruh perubahan yang lebih besar terhadap tingkat pencapaian pendidikan (jumlah tamatan SMU). Dengan melihat koefisien pertumbuhan jumlah sekolah tahun sebelumnya mempunyai elastisitas yang elastis terhadap tingkat pencapaian pendidikan, berarti perubahan yang terjadi pada pertumbuhan jumlah sekolah tahun sebelumnya akan menyebabkan pengaruh yang lebih besar pada tingkat pencapaian pendidikan. Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, peningkatan pertumbuhan PDRB perkapita dapat dipacu dengan mempercepat kesempatan pendidikan, sehingga pemerintah

berusaha untuk menambah prasarana pendidikan seperti dengan menambah jumlah sekolah. Terlihat bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia pada tamatan SMU dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah sekolah tahun sebelumnya.

Untuk variabel Jumlah tenaga pengajar mempengaruhi tingkat pencapaian pendidikan dari hasil estimasi menunjukkan arah yang negatif. Nilai koefisien pertumbuhan jumlah tenaga pengajar sebesar 0,443 artinya setiap peningkatan Jumlah tenaga pengajar sebesar 1 persen, maka akan berpengaruh pada menurunnya tingkat pencapaian pendidikan (jumlah tamatan SMU) Kota Palembang sebesar 0,443 persen. Angka pada koefisien tersebut menghasilkan elastisitas yang inelastis karena koefisien jumlah tenaga pengajar lebih kecil dari 1, berarti perubahan jumlah tenaga pengajar akan berakibat perubahan yang kecil pada tingkat pencapaian pendidikan dengan arah negatif. Dengan kata lain terjadinya pengaruh negatif dari pertumbuhan tenaga pengajar terhadap tingkat pencapaian pendidikan. Tenaga pengajar

merupakan indikator penting dalam kualitas sumber daya manusia, pada kenyataannya jumlah tenaga pengajar SMU Negeri belum dapat mempertinggi jumlah tamatan SMU dikarenakan keterbatasan anggaran untuk membiayai tenaga pengajar negeri sehingga membutuhkan tenaga pengajar honorer atau swasta.

Nilai Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,247 menunjukkan bahwa pengaruh PDRB Perkapita tahun sebelumnya, Jumlah sekolah dan Tenaga Pengajar Terhadap Tingkat Pencapaian pendidikan Kota Palembang sebesar 24,7 Persen. Dengan kata lain, Tingkat pencapaian pendidikan Kota Palembang dipengaruhi sebesar 24,7 persen oleh PDRB perkapita tahun sebelumnya, Jumlah sekolah, dan Tenaga Pengajar, sedangkan 75,3 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat di bentuk persamaan regresi untuk pengaruh Pengaruh Tingkat Pencapaian Pendidikan, Jumlah Tenaga Pengajar dan PDRB tahun sebelumnya Terhadap Pengeluaran

Pendidikan di kota Palembang sebagai berikut :

$$\ln Ge = - 46,320 + 2,603 \ln Tp - 0,429 \ln QL + 3,231 \ln PDRB_{t-1} + U \dots \dots \dots (2)$$

dimana :

- Ge = Pengeluaran Pendidikan
- b_0 = Konstanta
- b_1 = Angka arah atau koefisien regresi
- Tp = Tingkat Pencapaian Pendidikan
- QL = Jumlah Tenaga Pengajar
- PDRB = PDRB perkapita
- Ut = Variabel lainnya yang mempengaruhi Y_1

Hasil pembahasan ini merupakan persamaan kedua dimana adanya tingkat pencapaian pendidikan sebagai variabel bebas yang telah diestimasi pada persamaan pertama. Persamaan kedua ini untuk mengetahui hubungan atau pengaruh Tingkat pencapaian pendidikan yang telah diestimasi pada persamaan pertama, Jumlah tenaga pengajar dan pertumbuhan PDRB perkapita yang dilihat dari perubahan PDRB perkapita tahun sebelumnya terhadap pengeluaran pendidikan di Kota Palembang periode tahun 1992-2011. Estimasi pada persamaan pengeluaran pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota

Palembang dapat dilihat sebagai berikut :

Pencapaian pendidikan diproksikan tingkat pendidikan tertinggi SMU negeri, dari hasil estimasi pada persamaan kedua memiliki hubungan yang positif terhadap pengeluaran pendidikan. Koefisien Tingkat pencapaian pendidikan sebesar 2,603 artinya setiap peningkatan Tingkat Pencapaian Pendidikan (Jumlah Tamatan SMU) sebesar 1 persen, maka akan berpengaruh pada meningkatnya Pengeluaran Pendidikan Kota Palembang sebesar 2,603 persen. Nilai koefisien tingkat pencapaian pendidikan bersifat elastis terhadap pengeluaran pendidikan dimana koefisiennya menunjukkan angka lebih dari 1 berarti perubahan pada tingkat pencapaian pendidikan menyebabkan pengaruh yang lebih besar pada pengeluaran pendidikan. Mengacu pada ilmu ekonomi pendidikan dimana pendidikan (tamatan SMU) merupakan suatu indikator permintaan pencapaian terhadap pendidikan yang secara umum saling berkaitan dengan peningkatan pengeluaran

pembangunan di sektor pendidikan. Maka semakin tinggi permintaan pendidikan akan memberikan dampak peningkatan pengeluaran sektor pendidikan yang tinggi pula.

Pertumbuhan PDRB perkapita tahun sebelumnya mempunyai hubungan yang positif terhadap jumlah pengeluaran pendidikan. Dilihat dari nilai koefisien Pertumbuhan PDRB perkapita sebesar 3,231 artinya setiap peningkatan PDRB tahun sebelumnya sebesar 1 persen , maka akan berpengaruh pada meningkatnya pengeluaran sektor pendidikan Kota Palembang sebesar 3,231 persen. Koefisien Pertumbuhan PDRB perkapita tahun sebelumnya menunjukkan angka lebih dari 1 berarti pertumbuhan PDRB perkapita tahun sebelumnya bersifat elastis terhadap pengeluaran pendidikan sehingga perubahan pada pertumbuhan PDRB perkapita menyebabkan perubahan yang lebih besar terhadap pengeluaran pendidikan. Dengan kata lain semakin sejahtera penduduk suatu negara, maka pemerintah dapat

mengalokasikan anggarannya untuk sektor pendidikan semakin besar.

Nilai Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,561 menunjukkan bahwa pengaruh Pengaruh Tingkat Pencapaian Pendidikar dan PDRB tahun sebelumnya Terhadap Pengeluaran Pendidikan di kota Palembang sebesar 56,1 Persen. Dengan kata lain, Pengeluaran pendidikan Kota Palembang dipengaruhi sebesar 56,1 persen oleh Tingkat Pencapaian Pendidikan, Jumlah Tenaga Pengajar dan PDRB tahun sebelumnya, sedangkan 43,9 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Berdasarkan nilai-nilai koefisien regresi pada tabel diatas, dapat di bentuk persamaan regresi untuk pengaruh Pengeluaran Pendidikan, Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap PDRB Perkapita di kota Palembang sebagai berikut :

$$\ln \text{PDRB} = 12,711 + 0,163 \ln \text{Ge} + 0,049 \ln \text{Ti} - 0,498 \ln \text{Pe} + U \dots \dots \dots (3)$$

dimana :

- PDRB = PDRB Perkapita
- b_0 = Konstanta
- b_1 = Angka arah atau koefisien regresi
- Ge = Pengeluaran Pendidikan

- Ti = Tingkat Inflasi
- Pe = Tingkat Pengangguran
- Ut = Variabel lainnya yang mempengaruhi Y_1

Hasil pembahasan yang terakhir yaitu persamaan yang melihat dampak sektor pendidikan dan variabel diluar pendidikan yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB perkapita. Persamaan ini untuk mengetahui hubungan pengeluaran pendidikan, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan PDRB perkapita yang diwakili oleh PDRB Kota Palembang periode tahun 1992-2011. Estimasi pada persamaan pertumbuhan PDRB perkapita dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengeluaran pendidikan mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan PDRB perkapita. Koefisien Pengeluaran Pendidikan sebesar 0,163 artinya setiap peningkatan Pengeluaran Pendidikan sebesar 1 persen, maka akan berpengaruh pada meningkatnya PDRB Perkapita Kota Palembang sebesar 0,163 persen. Pengaruh pengeluaran pendidikan terhadap PDRB perkapita adalah positif dikarenakan peningkatan

kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan pertumbuhan PDRB perkapita. Jadi peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi baik, dimana salah satunya harus ditunjang dengan kontribusi pengeluaran pendidikan maka nantinya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan PDRB perkapita. Menurut teori pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan mempunyai maksud memberikan kebutuhan-perencanaan sumber daya manusia untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik dengan berbagai tindakan, dalam rangka menyelenggarakan segenap kegiatan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan PDB perkapita terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai modal pembangunan suatu negara.(Michael Todaro.2000). Oleh sebab itu pengeluaran pendidikan di Kota Palembang dengan anggaran pendidikan yang terealisasi atau anggaran pendidikan yang meningkat akan memberikan dampak peningkatan pada pertumbuhan PDRB perkapita di Kota Palembang

Variabel Tingkat inflasi mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan PDRB perkapita. Nilai koefisien Tingkat inflasi sebesar 0,049 artinya setiap peningkatan Tingkat inflasi sebesar 1 persen, maka akan berpengaruh pada peningkatan PDRB perkapita di Kota Palembang sebesar 0,049 persen. Koefisien Tingkat inflasi menunjukkan angkanya kurang dari 1 bersifat tidak elastis berarti perubahan tingkat inflasi menyebabkan perubahan yang kecil terhadap pertumbuhan PDRB perkapita. Berdasarkan data selama kurun waktu 20 tahun dari tahun 1992-2011 di kota Palembang tingkat inflasi rata-rata berada dibawah angka 10 persen kecuali saat krisis moneter tahun 1998 sebesar 89,18 persen. Angka ini menunjukkan bahwa menurut tingkatannya termasuk ringan karena nilainya dibawah 10 persen, menurut teori inflasi akan memberikan dampak yang positif, karena dengan kenaikan harga yang tidak begitu besar (wajar) akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya sehingga terjadi efisiensi pada akhirnya akan

meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga PDRB perkapita akan meningkat.

Tingkat pengangguran mempunyai hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan PDRB perkapita. Dilihat dari koefisien tingkat pengangguran sebesar 0,498 artinya setiap peningkatan tingkat pengangguran sebesar 1 persen, maka akan berpengaruh pada menurunnya PDRB Perkapita di Kota Palembang sebesar 0,498 persen. Jadi apabila terjadi peningkatan pengangguran dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang rendah maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja terdidik sehingga pertumbuhan PDRB perkapita akan menurun. Maksud disini adalah pengangguran terbuka yang tidak memiliki pekerjaan formal. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kualitas sumber daya manusia pada negara berkembang rendah diantaranya sistem pendidikan yang tidak memperhatikan aspek pemerataan (equality) dalam arti masih terjadinya jurang yang tinggi antara penduduk kaya dan miskin. Bagi penduduk miskin mengalami

masalah biaya yang lebih tinggi yang dibarengi dengan manfaat yang lebih rendah sehingga tingkat pengembalian investasi pendidikan pada penduduk miskin terbatas, maka besar kemungkinan akan putus sekolah. (Todaro.2000).

Nilai Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,624 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Pengeluaran Pendidikan, Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap PDRB Perkapita di kota Palembang sebesar 62,4 Persen. Dengan kata lain, PDRB Perkapita Kota Palembang dipengaruhi sebesar 62,4 persen oleh Tingkat Pencapaian Pendidikan, Jumlah Tenaga Pengajar dan PDRB tahun sebelumnya, sedangkan sisanya sebesar 37,1 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Perubahan PDRB perkapita tahun sebelumnya dan perubahan jumlah sekolah berpengaruh positif terhadap tingkat pencapaian pendidikan, sedangkan perubahan.

Jumlah tenaga pengajar berpengaruh negatif terhadap tingkat pencapaian pendidikan. Perubahan PDRB perkapita tahun sebelumnya dan perubahan jumlah tenaga pengajar bersifat inelastis terhadap tingkat pencapaian pendidikan berarti perubahan PDRB perkapita tahun sebelumnya dan perubahan jumlah tenaga pengajar menyebabkan perubahan yang kecil terhadap tingkat pencapaian pendidikan. Sedangkan perubahan Jumlah sekolah bersifat elastis terhadap tingkat pencapaian pendidikan berarti perubahan jumlah sekolah menyebabkan perubahan besar terhadap tingkat pencapaian pendidikan.

2. Tingkat pencapaian pendidikan dan perubahan PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap pengeluaran pendidikan, sedangkan perubahan Jumlah tenaga pengajar berpengaruh negatif terhadap pengeluaran pendidikan. Tingkat pencapaian pendidikan dan Perubahan PDRB perkapita tahun sebelumnya bersifat elastis terhadap

pengeluaran pendidikan berarti tingkat pencapaian pendidikan dan perubahan PDRB perkapita tahun sebelumnya menyebabkan perubahan yang besar terhadap pengeluaran pendidikan. Sedangkan perubahan Jumlah tenaga pengajar bersifat inelastis terhadap pengeluaran pendidikan berarti perubahan jumlah tenaga pengajar menyebabkan perubahan kecil terhadap pengeluaran pendidikan.

3. Perubahan pengeluaran pendidikan, dan tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB perkapita, sedangkan tingkat pengangguran negatif terhadap PDRB perkapita. Perubahan pengeluaran pendidikan, Tingkat inflasi dan Tingkat pengangguran bersifat inelastis terhadap perubahan PDRB perkapita. Berarti perubahan pengeluaran pendidikan, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran menyebabkan perubahan yang kecil terhadap PDRB perkapita.
4. Dampak dari tingkat pencapaian pendidikan tidak secara langsung

mempengaruhi pertumbuhan PDRB perkapita, yang dimana sebelumnya harus melihat pengaruh dari indikator pendidikan dan indikator di luar pendidikan.

Saran

1. Pendidikan sebagai instrumen utama dalam pembangunan akan membawa bangsa pada pertumbuhan ekonomi yang baik.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia disesuaikan dengan kriteria batas pendidikan untuk nekerja, karena adanya wajib belajar 9 tahun tidak sesuai dengan penyerapan tenaga kerja yang menginginkan pendidikan dengan minimum pendidikan SMU sederajat, maka perlunya wajib belajar sampai dengan tingkat SMU sederajat sebagai batasan minimum pendidikan untuk bekerja pada sektor formal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Pengeluaran pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga pengeluaran pemerintah sektor pendidikan

harus lebih diprioritaskan dibanding sektor-sektor lain.

4. Investasi pembangunan yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu investasi pada pendidikan hendaknya sebagai kajian teoritis namun lebih dari itu merupakan kajian paktek penyelenggaraan negara dalam pembangunan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung Edy Wibowo.2012. Aplikasi Praktis SPSS Dalam Penelitian.Penerbit Gava Medika Yogyakarta.
- Arif Rohman.2012. Membebaskan Pendidikan.Refleksi Menuju Penyelenggaraan Demokrasi Pendidikan di Indonesia. Penerbit.Aswaja Pressindo. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik.1992-2011. Sumatera Selatan Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik.1992-2011. Palembang Dalam Angka.
- Badang Pusat Statistik.2009-2011. Indikator kesejahteraan Rakyat Sumsel.
- Badan Pusat Statistik.1992-2011.Situasi Ketenaga Kerjaan di Sumatera Selatan.
- Badan Pusat Statistik. 2011. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Sumatera Selatan.
- Becker G and BR Chiswick. 1996.Human Capital and the Rise and Fall of Families”.

- Journal of Labour Economic,
Volume 4.
- Dadang Suhardan.2012. Ekonomi dan Biaya Pendidikan. Penerbit Alfabeta .Bandung
- Fery Andrianus.2000.Analisis Pengeluaran Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (1970-2000).Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Volume 1 No.2
- Gujarati, Damodar, (Sumarno Zain).1999.*Ekonometrika Dasar*. Cetakan Keenam .Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Muana Nanga,2005. Makro Ekonomi. *Teori, Masalah , dan Kebijakan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.Edisi Kedua
- Sugiyono. 2002. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan Keempat. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Suryana. 2001. *Ekonomi Pembangunan*. Problema dan Pendekatan. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Suseno Triyono Widodo. (2001). *Indikator Ekonomi – Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Cetakan ke-10 Penerbit Kanisius Yogyakarta.
- Suharyadi,Purwanto SK,2004. Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Tulus T.H. Tambunan, 2001. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Tulus Tambunan.2001.Transformasi Ekonomi Indonesia.Jakarta.Penerbit Salemba Empat
- Widodo, Soeseno Triyanto. 2001. *Indikator Ekonomi*. Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia Cetakan Kesepuluh. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.